

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi masalah penting yang terjadi di berbagai negara negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Secara definisi kemiskinan ialah suatu keadaan dimana individu/kelompok tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, baik kondisi ekonomi atau fisik. Pengentasan kemiskinan ialah salah satu mandate konstitusi yang dijelaskan pada pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa, fakir miskin dan anak anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Yang dimana air, bumi, udara dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dimiliki oleh negara dan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sejak periode September 2019 – Maret 2020 angka penduduk Miskin di Indonesia di bulan maret 2020 mencapai 26,42 juta orang (9,78 Persen), terjadi peningkatan 1,63 juta orang jika dibandingkan dengan September 2019 yang sebanyak 24,79 juta orang (9,22 Persen) (BPS,2020). Salah satu penyebab terjadinya lonjakan penduduk miskin adanya dampak dari Pandemi Covid 19 dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan terjadi pemutusan hubungan kerja dan beberapa sektor usaha yang terdampak.

Jenis program dalam upaya pengentasan kemiskinan, telah dibuat oleh pusat dalam upaya meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM), adapun langkah yang dilakukan ialah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai tindak lanjut maka dibentuk Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K) baik dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat bawah yang melibatkan pihak-pihak yang terkait baik dari sektor usaha dan pihak-pihak lainnya yang diminta untuk berkolaborasi.

Salah satu upaya Pemerintah dalam penanganan kemiskinan ialah dengan di buatnya Program bantuan Sembako Nasional (BSN) selain bertujuan meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan juga bertujuan dalam memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat. Program BSN merupakan salah satu cara pemerintah untuk merubah jenis bantuan menjadi non tunai yaitu melalui penggunaan kartu digital yang di distribusikan langsung kepada KPM. Bantuan Sembako Nasional sendiri termasuk kedalam jaringan pengaman sosial yang menargetkan masyarakat bawah yang terkena dampak pandemi kebijakan ini dianggap tepat meskipun masalah teknis seperti akurasi data penerima bantuan serta urgensi waktu yang belum terpecahkan (Suparman, 2021).

Dalam rangka peningkatan perlindungan sosial dan menguatkan efektivitas bantuan sosial pada tahun 2020 Program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. melalui program sembako Indeks bantuan yang awalnya Rp 110.000 Per KPM menjadi Rp 150.000 per KPM setiap bulannya. Lalu terjadi perubahan nominal Bantuan yang awalnya Rp 150.000 Menjadi Rp. 200.000 per KPM. Dan tidak dapat di ambil tunai namun diganti dengan jenis komoditas pangan yang sudah diperluas jenisnya berbeda dengan BPNT yang hanya beras dan telur.

Adapun yang berhak menerima manfaat bantuan sembako nasional (BSN) ialah Keluarga yang sudah terdata dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) bantuan

sembako dan divalidasi oleh KPA di kementerian sosial. Yang data nyang berasal dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun kriteria yang layak menerima manfaat bantuan Sembako Nasional (BSN) ialah masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan kebijakan BPNT.

Menurut menteri keuangan mencatat Laporan Realisasi Penyaluran BPNT Kartu Sembako sampai 6 Mei 2020 Sebesar 32,4% atau Rp 14,16 Triliun dari Anggaran yang telah di siapkan Senilai Rp 43,6 Triliun . Namun masih terjadi masalah dalam target penerima dan data penerima.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi Penyaluran bantuan Sembako maka Kementerian sosial menetapkan 6 Prinsip bantuan sembako (2020) yaitu :

a. Tepat Sasaran

Dimana dalam distribusi Bantuan Sosial nya diserahkan kepada keluarga yang terdaftar dan memenuhi kriteria Penerima Manfaat.

b. Tepat Jumlah

Dalam penyaluran Bantuan Sosial Secara Kuantitas (Jumlah) sesuai dengan ketentuan dimana item yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat tidak kurang secara jumlah.

c. Tepat Waktu

Penyaluran Bantuan Sosial di laksanakan pada waktu yang di tentukan dan Keluarga Penerima Manfaat Berhak Mengambil pada tanggal yang sudah di tentukan.

d. Tepat Harga

Jenis barang yang di salurkan ke masyarakat harus sesuai dengan nominal bantuan yang di tentukan. Mengikuti harga yang dijadikan standard bahan pokok di suatu daerah.

e. Tepat Kualitas

Barang yang diberikan kepada Keluarga penerima manfaat harus layak secara kualitas barang.

f. Tepat Administrasi

Segala bentuk administrasi yang di lakukan selama proses penyaluran harus terdata sehingga bisa di pertanggung jawabkan.

Untuk mewujudkan 6 prinsip di atas perlu adanya tata kelola program bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas program tersebut. Dalam hal ini tata kelola yang baik dalam program sembako nasional perlu diterapkan supaya meminimalisir kesalahan dalam tata kelola yang akan berdampak pada kualitas pengelolaan bantuan sosial sendiri seperti ketidak tepatan penerima bantuan sosial kualitas dan kuantitas bantuan yang di terima masyarakat. Maka perlunya penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan program Bantuan Sembako Nasional dimana menekankan pada kesesuaian antara tujuan dan sasaran (Nurhasim:2014) sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan berdampak terhadap ketahanan pangan keluarga yang masih berada pada taraf miskin.

Di Kota Bandung sendiri pada Bulan Mei - Juni berdasarkan informasi dari koordinator tenaga kesejahteraan sosial (TKSK) Kota Bandung terdapat penambahan jumlah penerima bantuan sosial di setiap kecamatannya dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 dengan total penerima bantuan sebanyak 96.380

Penerima Bantuan, Kecamatan Mandalajati termasuk Kecamatan yang mengalami kenaikan jumlah penerima bantuan yang signifikan sebesar 86,67% dibandingkan dengan kecamatan yang lain, Kecamatan Mandalajati sendiri merupakan kecamatan percontohan di Kota Bandung dalam program labelisasi bantuan sosial, pada Bulan Juli Tercatat sebanyak 2.776 KPM penerima Bantuan Sembako Nasional (BSN) yang tersebar di 4 Kelurahan dan 53 Rukun Warga :

Tabel 1.1
Jumlah KPM Bantuan Sembako Nasional (BSN) Kecamatan Mandalajati
Bulan Mei – Juli 2020

No	Kelurahan	Mei	Juni	Juli
1	Jatihandap	593	1103	1104
2	Pasir Impun	304	411	411
3	Sindangjaya	205	400	401
4	Karang Pamulang	505	860	860
Jumlah		1607	2774	2.776

Sumber : Kantor Kecamatan Mandalajati data 2020

Berdasarkan Laporan Penyaluran Bantuan Sembako Nasional (BSN) bulan Juli 2020 terdapat beberapa permasalahan antara lain Masih adanya Komiditi sembako yang diterima oleh KPM kualitas nya kurang baik. Masih adanya penerima bantuan yang belum mengetahui jenis komoditi yang diterima. Penyaluran yang terkendala dengan beberapa KPM yang tidak hadir, meninggal dan data tidak ditemukan dan permasalahan dalam KKS.

Dalam transparansi sendiri belum adanya media sosial yang digunakan untuk mensosialisasikan jenis komoditi yang diterima oleh keluarga penerima bantuan (KPM) ditandai dengan belum optimal nya penggunaan media sosial seperti penuturan Ibu Lina Yuniar selaku Tikor Kecamatan Mandalajati:

“Di Instagram ada juga akun Kesos namun kita nggak aktif, ada IG dan Website kecamatan aktif cuman kita kurang untuk sosialisasi terkait Bantuan sembako”

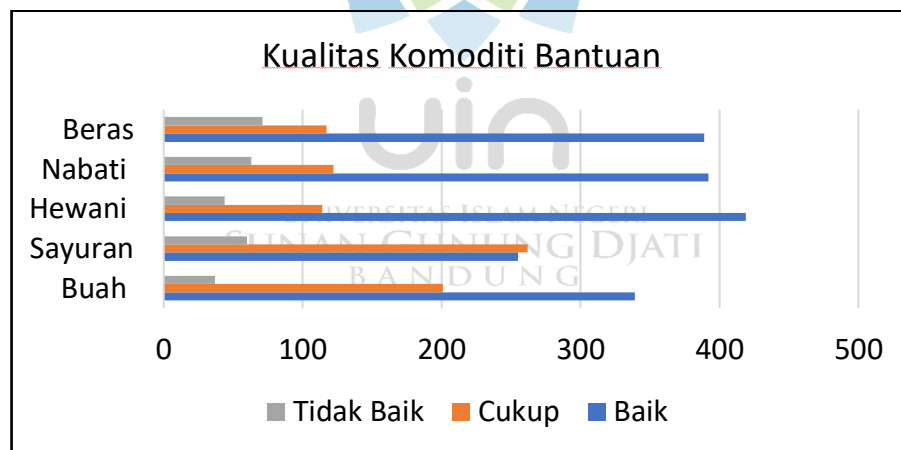
Selain itu masih ditemukannya penerima manfaat bantuan yang menerima komoditi yang belum sesuai dengan ketentuan dari segi kualitas dan kuantitas. wawancara awal yang penulis lakukan kepada Ibu Yoyoh sebagai penerima bantuan :

“Ibu pernah nemu sayuran yang jelek tapi ama ibu diambil aja, kalau misalnya mau minta ganti mh tinggal bilang ke bu oneng”

Diperkuat dengan data Survey kepuasan penerima bantuan bulan September 2020 yang menunjukkan masih adanya penerima bantuan yang menerima bantuan yang belum sesuai secara kualitas dan kuantitas komoditi pangan.

Gambar 1.1

Data Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bulan September 2020



Sumber: Survey Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Bulan September 2020

Masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan basis data penerima bantuan seperti data penerima bantuan tidak ditemukan, masih terdapat penerima bantuan yang sudah meninggal dan penerima bantuan yang tidak bisa hadir pada saat penyaluran.

Tabel 1.2

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengambil BSN

Per Bulan Juli 2020

NO	ALASAN	Juli
1	Tidak dapat hadir	7 KPM
2	Meninggal	29 KPM
3	Pindah	15 KPM
4	Tidak ditemukan	33 KPM
	Total	84 KPM

Sumber: Kantor Kecamatan Mandalajati 2020

Masih ditemukannya Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang berfungsi sebagai syarat dalam pengambilan Bantuan Sembako Nasional (BSN) yang masih bermasalah mengakibatkan ada KPM yang tidak bisa mengambil bantuan pada waktu penyaluran.

Tabel 1.3

Jumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bermasalah per Bulan Juli 2020

NO	ALASAN	JUMLAH KPM
1	Kartu tidak ditemukan	60 KPM
2	Kartu terblokir	16 KPM
3	Kartu hilang	4 KPM
4	Kartu rusak	8 KPM
5	Kartu instan	9 KPM
6	Data tidak tersedia	22 KPM
7	Kartu double	6 KPM
	Total	125 KPM

Sumber: Laporan Bantuan Sembako Nasional Kecamatan Mandalajati Juli 2020

Melihat masalah di atas perlunya sebuah tata kelola yang efektif sehingga program bantuan bisa berjalan dengan optimal. maka peneliti menganggap penelitian mengenai ini penting dengan Judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Bantuan Sembako Nasional (BSN) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di paparkan di atas, maka Identifikasi Masalahnya yaitu :

1. Masih belum transparannya kualitas dan kuantitas komoditi barang yang diberikan kepada keluarga penerima bantuan (KPM).
2. Masih di temukan penerima Bantuan Sosial yang bermasalah dalam basis data dan kartu KKS yang bermasalah mengakibatkan penyaluran bantuan belum optimal.
3. Masih kurangnya sosialisasi oleh pengelola dalam memberikan informasi kepada penerima bantuan terkait komoditi pangan yang diterima.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas, ,maka dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati ?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati ?

3. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati ?
4. Bagaimana penerapan prinsip Efektivitas Program dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka Tujuan dan maksud dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ?
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip responsivitas dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ?
4. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Efektivitas Program dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ?

E. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun hal yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dari hasil penelitian ini menambah sumbangan khazanah keilmuan dalam perkembangan ilmu yang memiliki korelasi dengan Administrasi Publik. fokusnya terkait tata kelola kebijakan Bantuan Sembako Nasional (BSN).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu administrasi publik dan menjadi bahan kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya terutama bidang kajian kebijakan publik khususnya pengelolaan Bantuan Sembako Nasional (BSN).

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi *policy brief* bagi pemerintah khususnya aparaturnya Kecamatan Mandalajati dalam tata kelola kebijakan Bantuan Sembako Nasional (BSN).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi penjelasan dari *Penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional (BSN) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung*. Bertujuan untuk mempermudah peneliti atau pembaca dari penelitian ini untuk memahami dan mengetahui tujuan dari penelitian berkaitan dengan kebijakan Bantuan Sembako Nasional (BSN) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Yang dimana dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mandalajati masih memerlukan perbaikan dalam

pengelolaan bantuan sembako ditandai dengan masih ditemukannya permasalahan seperti masih ditemukannya penerima bantuan yang menerima bantuan kurang sesuai menurut ketentuan dari segi kualitas dan kuantitas, masih kurangnya sosialisasi serta permasalahan dalam basis data yang mengakibatkan penyaluran bantuan belum optimal.

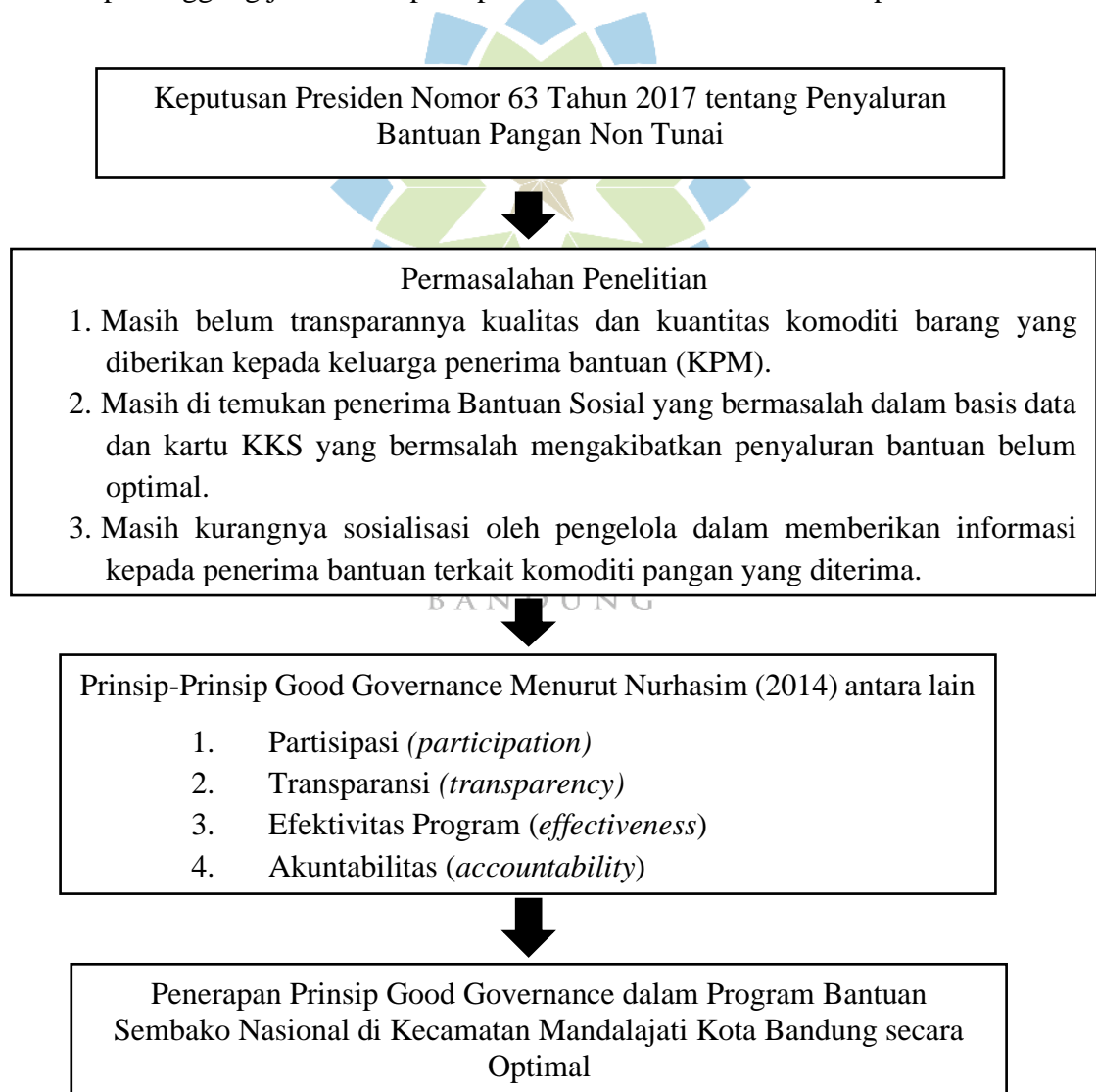
Pada penelitian ini, peneliti dalam melakukan penelitian terkait Pengelolaan Bantuan Sembako Nasional (BSN) di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, untuk menjawab *research question* penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Model *Good Governance* menurut Nurhasim dkk (2014) Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penelitian ini ialah empat prinsip yang merupakan strategi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan (*Pro Poor Policy*).

Menurut United national Development Program (UNDP) dokumen “*Governance is the exercise human development*” (UNDP, 2010) mendefinisikan *governance* sebagai berikut: Kepemerintahan ialah dilaksanakannya kebijakan dibidang politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola segala kegiatan pemerintah pada setiap tingkatan dan merupakan kebijakan negara untuk memajukan kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial. Adapun keempat prinsip tersebut yaitu :

1. Partisipasi (*participation*): Keikutsertaan penerima bantuan dalam pelaksanaan penyaluran dan peran aktif penerima bantuan dalam memberikan kritik dan saran untuk perbaikan program.
2. Transparansi (*transparency*): Peranan pengelola program bantuan dalam memberikan informasi secara menyeluruh kepada penerima bantuan yang

dimana menggunakan media informasi yang mudah di akses oleh penerima bantuan.

3. Efektivitas Program (*effectiveness*): Untuk mengukur pada tercapainya hasil/dampak terhadap perubahan kualitas hidup individu masyarakat, struktur social, atau lingkungan fisik pada program yang diimplementasikan
4. Akutabilitas (*accountability*) : Bagaimana pengelola program melaporkan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah dan instansi pemerintahan



Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran